

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA  
TUNAI (PKT) TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
TIA SARI HANDAYANI  
NPM.1951010213**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA  
TUNAI (PKT) TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**TIA SARI HANDAYANI  
NPM.1951010213**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I: Dr. Madnasir, S.E., M.S.I  
Pembimbing II: Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai Desa. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan petunjuk dalam pengelolaan kegiatan Dana Desa bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tujuan dari Padat Karya Tunai Dana Desa. Secara teknis Pemerintah Desa mengutamakan pemanfaatan SDA, SDM beserta teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Metode Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian secara langsung atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya demi menemukan fakta-fakta yang ada pada masyarakat mengenai masalah-masalah yang terjadi. Dalam hal ini peneliti dalam mengumpulkan data yang valid, peneliti meneliti langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu di Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas program Padat Karya Tunai belum cukup dikatakan efektif dikarenakan menurut data yang diperoleh terdapat penurunan dalam tiga tahun terakhir sehingga tidak mencapai *goals approach* sebagai tolak ukur ke efektivitasan dimana perealisasi pembangunan dialihkan pada penanganan *Covid-19* berupa bantuan BLT, dalam Pelaksanaan untuk pemberdayaan masyarakat dikatakan cukup efektif Dimana hal tersebut dapat diuraikan melalui kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan pra sarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam perspektif ekonomi islam hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar dari ekonomi islam yaitu kepedulian, keadilan, kesamaan.

**Kata Kunci: Padat Karya Tunai, Dana Desa, Pemberdayaan**

## **ABSTRACT**

*With the stipulation of the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 19 of 2017 concerning setting priorities for the use of Village Funds for 2018 to finance Village Cash Work Intensive. There is part of the government's efforts to provide control, guidance and guidance in managing Village Fund activities so that they can achieve the objectives of the Village Fund Cash Work Intensive. Technically the Village Government prioritizes using natural resources, human resources and local technology to provide additional income, reduce poverty levels, and improve the welfare of the village community.*

*The research method of this thesis uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The research used by the authors in this study is direct research or reference field research, namely research conducted in actual communities to find facts that exist in the community regarding the problems that occur. In this case, researchers in collecting valid data, researchers examined directly from research locations related to this problem, namely in Cipta Mulya Village, Kebun Tebu District, West Lampung Regency.*

*The results of the study illustrate that the effectiveness of the Cash Labor Intensive program is not sufficiently effective because accord to the data obtained, there has been a decline in the last three years it does not reach the goals approach as a measure of effectiveness where the realization of development diverted to handling Covid-19 in the form of BLT assistance, in the implementation of community empowerment said to be quite effective. PKT is described through the clarity of the goals to be archived, strategies for achieving goals, the process of analysis and formulation of policies, careful planning, preparation of appropriate programs, availability of work facilities and infrastructure, effective and efficient efficient implementation, and educational supervision and control system. Whereas in the perspective of Islamic economics this is in accordance with the basic values of Islamic economics, namely caring, justice, equality.*

**Keywords:** *Cash Labor intensive, Village Fund, Empowerment*

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tia Sari Handayani  
NPM : 1951010213  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**” dengan benar merupakan hasil ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri bukan dari duplikasi maupun saluran dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dicantumkan dalam *footnote* dan daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 5 Mei 2023

Penulis,



**Tia Sari Handayani**

NPM.1951010213



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).

**Nama** : Tia Sari Handayani

**NPM** : 1951010213

**Jurusan/Prodi** : Ekonomi Syariah

**Fakultas** : Ekonomi Dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Dr. Madnasir, S.E., M.S.I**  
NIP.197504242002121001

  
**Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**  
NIP.

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

  
**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
NIP. 1982080820110112009



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”, Disusun Oleh Tia Sari Handayani, NPM : 1951010213 program studi Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Senin/15 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Sherly Etika Sari, M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I (.....)

Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Agus Supriyanto, S.E., M.M., Akt., C.A.

009262008011008



## MOTTO

**“ Saha Nu Keyeung Pasti Pareng ”**  
**( Siapa yang bersungguh-sungguh maka tujuan yang dicita-**  
**citakan akan tercapai )**

-Ceuk Mamah-

**Tapi**

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا  
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*(Q.S. Al Baqarah [2]: 216).*




## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Ibundaku tercinta Ibu Ehat dan Ayahandaku tercinta bapak Muchlisi, yang telah mendidik, mengarahkan, serta selalu memberi dukungan baik secara fisik ataupun materi, motivasi dan memberikan kasih sayang serta do'a restunya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun akhirat.
2. Adikku semata wayang, Muhammad Rizky Afriansyah yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Suamiku tersayang, Thohirin, S.Pd yang selalu ada untuk mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi yang peneliti tulis.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga serta memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama.

## **RIWAYAT HIDUP**

Tia Sari Handayani, dilahirkan di desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 25 Februari 2001, anak pertama dari pasangan bapak Muchlisi dan ibu Ehat. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019.



Bandar Lampung, April 2023  
Penulis

Tia Sari Handayani

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan ilmuNya kepada semua makhluk. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, bimbingan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk hal itu maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M., Akt., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II dan III.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. Madnasir, S.E., M.S.I dan Ibu Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis hingga dapat terselsaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh masyarakat yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung telah memberikan ilmu yang berarti.

6. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literatur bagi penulis.
7. Orang tuaku, suami serta adikku dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days of, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.<3*

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya. Semoga semua pihak yang membantu penulis mendapat pahala dari Allah SWT. serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

*Wassalamu' Aaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Bandar Lampung, April 2023  
Penulis

Tia Sari Handayani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	23

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas .....	23
1. Pengertian Efektivitas .....	23
2. Pendekatan Dalam Mengukur Efektivitas .....	24
B. Padat Karya Tunai (PKT) .....	27
1. Pengertian Padat Karya Tunai.....	27
2. Prinsip Padat Karya Tunai .....	31
3. Tujuan dan Manfaat Padat Karya Tunai .....	32
4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai .....	33
C. Konsep Dana Desa .....	34
1. Pengertian Desa .....	34
2. Definisi Dana Desa.....	36

3. Pokok-Pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai .....	38
4. Tahapan Persiapan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai.....	38
5. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai .....	39
6. Tahapan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai .....	40
D. Pemberdayaan Masyarakat .....	41
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	41
2. Tujuan Pemberdayaan .....	43
3. Indikator Pemberdayaan .....	45
4. Rencana Pembangunan Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat .....	46
5. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam.....	47

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Objek .....	52
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian.....	60
1. Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa di Desa Cipta Mulya.....	60
2. Analisis Pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Cipta Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.....	75

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa pada Desa Cipta Mulya .....	86
B. Pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Cipta Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.....	93

C. Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa pada Desa Cipta Mulya Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	97
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Rekomendasi .....	103

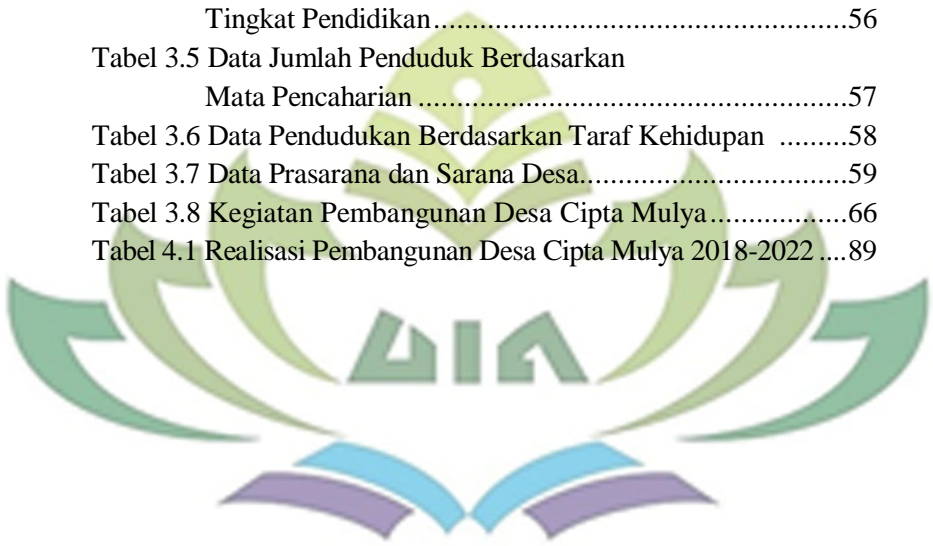
**DAFTAR RUJUKAN..... 105**

**LAMPIRAN .....**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBDes yang diterima Desa Cipta Mulya Periode 2018-2022 .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Populasi Penelitian .....	17
Tabel 3.1 Nama dan Masa Jabatan Peratin Cipta Mulya .....	54
Tabel 3.2 Data Jumlah Jiwa berdasarkan Golongan Usia .....	55
Tabel 3.3 Data Jumlah Jiwa Berdasarkan Agama .....	55
Tabel 3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	56
Tabel 3.5 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	57
Tabel 3.6 Data Pendudukan Berdasarkan Taraf Kehidupan .....	58
Tabel 3.7 Data Prasarana dan Sarana Desa .....	59
Tabel 3.8 Kegiatan Pembangunan Desa Cipta Mulya .....	66
Tabel 4.1 Realisasi Pembangunan Desa Cipta Mulya 2018-2022 ....	89





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang isi proposal skripsi, maka untuk menghindari terjadi kekeliruan dalam penelitian ini, peneliti perlu untuk memberikan uraian dan penegasan terhadap arti dan maknanya sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis dalam istilah penelitian dapat dikatakan proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan informasi yang tersedia, selain itu analisis juga merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu dimana semua aspek tersebut memiliki peran yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>1</sup>

#### 2. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.<sup>2</sup>

#### 3. Program Padat Karya Tunai (PKT)

Program Padat Karya Tunai (PKT) merupakan suatu kegiatan pemberdayaan keluarga marginal/miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan SDA, teknologi local dan tenaga kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat bahkan bertujuan untuk membantu penurunan angka stunting.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

<sup>2</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Jawa Timur: AE Publishing, 2020).

<sup>3</sup> Dirjen Pembangunan, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai* (Jakarta, 2018).

#### 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat” yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar.<sup>4</sup>

#### 5. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup>

#### 6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, dan cara-cara Islami tersebut didasarkan atas ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan judul dalam skripsi ini adalah mengetahui bagaimana Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam di desa Cipta Mulya kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

### **B. Latar Belakang**

Pembangunan dalam suatu Negara merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta seharusnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan dilakukan melalui proses yang terencana dan mencakup semua aspek kehidupan. Pemerintah perlu berupaya mengambil kebijakan yang tepat dan bersifat adil untuk

---

<sup>4</sup> Rudi Susilana and Cepi Riyana, *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Penilaian* (Jakarta Utara: CV. Wacana Prima, 2008).

<sup>5</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jawa Timur: Bumi Aksara, 2021).

<sup>6</sup> Jaharuddin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2019).

menjamin warganya berada dalam taraf hidup yang layak sehingga menjadikan masyarakat di Indonesia sejahtera.<sup>7</sup>

Pembangunan merupakan upaya yang dilaksanakan secara sadar dan juga terencana, dilakukan terus menerus oleh pemerintah bersama masyarakatnya untuk dilaksanakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, dengan teknologi yang terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan bahkan dapat memecahkan masalah yang sedang atau akan dihadapi, demi tercapainya sebuah kesejahteraan sebagai mutu hidup seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan suatu pembangunan.

Komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian diharapkan dapat terwujudnya desa yang mandiri dimana: 1) Desa bukan sekedar sebagai objek penerima manfaat, tetapi dapat juga sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. 2) Sebagai komponen desa memiliki rasa kebersamaan dan sebuah gerakan untuk mengembangkan aset local sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat. 3) desa memiliki kemampuan mengasihkan serta mencukupi kebutuhan bahkan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi, layanan dasar, dll.<sup>8</sup>

Menurut pendapat sudut pandang peneliti desa di Indonesia secara keseluruhan masih dapat dikatakan lemah dalam berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi maupun pendanaan. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi

---

<sup>7</sup> Rumsari Hadi Sumarto and Lukas Dwiantara, "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Journal Publicuho*, Vol 2, No. 2 (2019): 65–74. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>

<sup>8</sup> Retno Dewi Anggraeni, and Ani Margawati, "Kesehatan Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistematis Review," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol 14, No. 2 (2021): 139–51. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10875>

program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya. Secara garis besar diprioritaskan untuk pembiayaan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. Prioritas penggunaan Dana Desa diputuskan melalui forum musyawarah desa sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat desa.<sup>9</sup> Melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai Desa. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan petunjuk dalam pengelolaan kegiatan Dana Desa bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tujuan dari Padat Karya Tunai Dana Desa.<sup>10</sup>

Dari data sementara yang penulis peroleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cipta Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 1.1 APBDes yang diterima Desa Cipta Mulya Periode 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 1.164.268.462
2	2019	Rp. 1.252.551.486
3	2020	Rp. 1.313.680.520
4	2021	Rp. 1.253.257.400
5	2022	Rp. 1.197.504.500
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 6.181.262.368</b>

*Sumber: APBDes Desa Cipta Mulya Tahun 2018-2022*

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan

<sup>9</sup> Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol 3, No. 3 (2021), 189–202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>

<sup>10</sup> Dirjen Pembangunan, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai* (Jakarta, 2018).

masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.<sup>11</sup>

Efektivitas merupakan salah satu hal terpenting dalam mengukur keberhasilan sebuah program. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian hasil (output) dari tujuan yang telah direncanakan, dikemukakan oleh Martani dan Lubis bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat melalui pendekatan sasaran (*goals approach*).<sup>12</sup> Dalam hal ini, pengukuran efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa diukur melalui output yang dihasilkan apakah dapat menunjang kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah membuat berbagai cara agar pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat sebuah dana desa, walaupun pada kenyataannya ternyata perhatian pemerintah terhadap kemajuan pembangunan desa melalui Dana Desa ternyata belum mampu secara optimal mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Desa. Sehingga, Pemerintah mengambil kebijakan penerapan skema Padat Karya Tunai dalam penggunaan dana desa yang dimulai pada Tahun Anggaran 2018.<sup>13</sup>

Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi

---

<sup>11</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018).

<sup>12</sup> Hari Lubis and Martani Huseini, *Teori Organisasi* (Jakarta: Pusat Antar Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).

<sup>13</sup> Anak Agung Gde Rai Budiasa, A A Gde Raka, and I Made Mardika, "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Lebih, Gianyar," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No. 2 (2019): 71–82. <https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.71-82>

kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.<sup>15</sup>

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Dengan adanya pemberdayaan maka akan menciptakan sebuah pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu tujuan pentingnya pemberdayaan dalam islam. Sehingga dengan seperti itu taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik. Dalam Islam juga terdapat penjelasan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu dari sasaran program padat karya tunai khususnya peningkatan ekonomi masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra'd [11]:)*

Berdasarkan Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Maka dari itu dapat kita pahami bahwa dengan melalui pemberdayaan masyarakat

<sup>14</sup> KemenKeu RI, *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* ( Jakarta, 2017).

<sup>15</sup> Rajab Lubis and Arifal Hidayat, “Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah,” *Jurnal Taxiway* , Vol 2, No. 1 (2020): 11–18.

diharapkan masyarakat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan begitu mereka dapat mengelola dan mempertajam kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir sehingga dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Dalam perspektif islam aktivitas ekonomi pandang sebagai suatu kewajiban kifayah. Oleh karena itu, aktifitas ekonomi mejadi tuntutan langsung agama Islam dimana setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan melalui syariah Islam merupakan satu bentuk ibadah.<sup>16</sup>

Pembangunan infrastruktur Desa Cipta Mulya beberapa merupakan pembangunan yang dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai yang menggunakan dana desa, adapun pembangunan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan atau rabat beton yang notabennya merupakan akses masyarakat menuju ketempat mata pencahariannya seperti sawah maupun kebun, serta akses yang menghubungkan masyarakat menuju daerah lain agar lebih mudah untuk pendistribusian hasil mata pencaharian. Selain itu, pembangunan melalui program Padat Karya Tunai juga menitik beratkan pada masyarakat yang ikut berpartisipasi adalah keluarga miskin, pengangguran, sehingga program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Desa Cipta Mulya.

Pembangunan desa melalui Program Padat Karya Tunai merupakan salah satu bentuk pembangunan yang melibatkan peran masyarakat sebagai subyek pembangunan, dimana pembangunan ini melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan yakni melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, proses pembangunan hingga tahap perawatan. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui Program Padat Karya Tunai merupakan hal mulia, karena pengutamakan masyarakat desa yang miskin untuk memperoleh lapangan kerja. Adanya dana desa benar-benar memanfaatkan untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan desa yaitu penanggulangan kemiskinan. Tetapi dalam beberapa desa ternyata

---

<sup>16</sup> Muhamad Rudi Wijaya and Anas Habibi Ritonga, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam," *Jurnal Taffkirul Iqtishodiyah (JTI)*, Vol 1, No. 2 (2021): 21–33.

masih terdapat beberapa pemanfaatan dana desa yang dianggap kurang efektif dalam Program Padat Karya Tunai Ini dikarenakan pada garis besarnya program ini memerlukan sebuah kinerja masyarakat secara langsung sehingga ada beberapa masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat dana desa melalui program ini terpaksa mereka tidak merasakan dana desa tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat terpaksa tidak merasakan salah satunya seperti kurangnya kemampuan masyarakat dalam keahlian dibidang tukang menukang kurang mendukungnya kondisi tubuh seperti kesehatan, bahkan kurang mendukungnya program ini bagi wanita sebagai masyarakat yang terkadang membutuhkan sebuah pekerjaan. Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas maka kebijakan Padat Karya Tunai di Desa perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan, pemecahan permasalahan dan mengetahui dampak yang diinginkan yang dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan kedepannya.

Agar efektif dalam pelaksanaannya, penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai harus dilanjutkan dengan memfokuskan kembali pada kegiatan pembangunan desa yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, desa-desa perlu difasilitasi untuk memprioritaskan penggunaan dana desa, untuk kegiatan pembangunan desa yang bersifat produktif dan berkelanjutan secara ekonomi, serta dapat melibatkan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (PKT) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk lebih efektif dalam penelitian ini dan dapat kita ketahui bahwa pembahasan ini dapat meluas. Maka kajian penelitian ini dibuat sebuah focus penelitian agar dapat menghindari kesalahan



pahaman yang dapat menimbulkan kekacauan dalam penulisan sebuah skripsi selanjutnya.

1. Dana Desa yang penulis teliti disini terfokus pada bagaimana efektivitas Program Padat Karya Tunai terhadap pemberdayaan masyarakat dalam penyaluran fungsi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
2. Evaluasi bagaimana realisasi Program Padat Karya Tunai terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, Rumusan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap pemanfaatan Dana Desa pada desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana efektivitas program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap pemanfaatan Dana Desa pada desa Cipta Mulya menurut perspektif Ekonomi Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan efektivitas program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap pemanfaatan Dana Desa pada desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

3. Untuk menjelaskan efektivitas program Padat Karya Tunai (PKT) terhadap pemanfaatan Dana Desa pada desa Cipta Mulya menurut perspektif Ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademis dimana dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian tentang bagaimana pemanfaatan Dana Desa melalui program Padat Karya Tunai untuk pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai bagaimana efektivitas dari sebuah pemanfaatan Dana Desa Melalui program Padat Karya Tunai terhadap Pemberdayaan masyarakat dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas atau bahkan Universitas.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam sebuah kinerja dimana efektivitas dalam sebuah program bantuan khususnya Padat Karya Tunai harus diperhatikan dalam penyalurannya sesuai dengan bagaimana perspektif islam yang mengedepankan sebuah keadilan didalamnya baik diterapkan oleh pemerintah, aparat desa ataupun kita sebagai masyarakat. Hal lainnya manfaat praktis yang dapat dirasakan baik itu bagi:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sebuah kajian, pengetahuan dan kajian khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
- b. Bagi UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Ekonomi Syariah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai awal bagi penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang analisis sebuah efektivitas penyaluran program bantuan khususnya Program Padat Karya Tunai.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sebuah pemahaman tentang bagaimana sebuah pemanfaatan Dana Desa melalui program Padat Karya Tunai dan diharapkan

masyarakat agar merasakan manfaatnya untuk berpartisipasi dalam sebuah program yang bertujuan untuk membantu peningkatan pemberdayaan masyarakat.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pemilihan judul pada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan juga dapat dijadikan acuan pendukung pada penelitian yang akan dilakukan ini dimana didalamnya teridentifikasi adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat pada setiap penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu tentang “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” adalah sebagai berikut:

1. “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo” Jurnal Inovasi Kebijakan oleh Irfan Sofi, 2020. Penelitian ini bertujuan yaitu Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa, dan Kendala pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik validasi data secara triangulasi yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan, PKT dana desa mampu menyerap minimal 55 tenaga kerja untuk setiap kegiatan dan rata-rata pemenuhan Hari Orang Kerja (HOK) masih di bawah 30 persen. PKT dana desa juga membuat berkurangnya semangat gotong royong di desa. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu PKT Dana pada 2018 secara umum berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pada penelitian ini disampaikan bahwa ada beberapa masukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKT Dana Desa, dimana Pemerintah perlu mempertahankan program PKT Dana Desa ini karena sangat bermanfaat untuk masyarakat desa dalam rangka meningkatkan

pendapatan masyarakat secara langsung khususnya yang menganggur atau setengah menganggur.<sup>17</sup>

2. “Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” Jurnal ilmiah Muqaddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora oleh Ujang Endi Kurnia dan Ni Wayan Widhiasthi, 2021. Tujuan Peneliti ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003), Penentuan informan ditentukan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu: Pelaksanaan PKT Desa dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, perataan dan responsivitas, sedangkan kriteria kecukupan dan perataan belum cukup dipenuhi karena kebijakan Padat Karya Tunai di Desa belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana terletak pada regulasi yang mengatur. 3) Dampak Pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana yaitu a) Pelaksanaan PKT mampu memberdayakan kelompok marginal yaitu kelompok keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, b) Dengan adanya PKT di Desa dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, c) Kebijakan PKT dapat mendorong Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat marginal dalam pelaksanaan pembangunan desa<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Irfan Sofi, “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pasuruan Dan Kabupaten Probolinggo,” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol 4, No. 1 (2020): 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>

<sup>18</sup> Kurnia and Widhiasthini, “Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal ilmiah Muqaddimah*, Vol 5, No. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.148-161>

3. “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa” *Journal Publicuho Faculty of social and political sciences halu oleo university* oleh Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara, 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat desa melalui Dana Desa sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui analisis dokumen seperti data yang terdapat dalam berbagai media, buku dan dokumen lainnya. Penggunaan Dana Desa sangat penting untuk mencegah arus urbanisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajat kehidupannya dapat terakomodasi melalui kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, seyogyanya Dana Desa tetap digulirkan hingga desa benar-benar menjadi wilayah yang mandiri, masyarakatnya berpendidikan dan sejahtera serta mampu mengangkat wajah desa menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan.<sup>19</sup>
4. “Penguatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Subyek Pembangunan Melalui Program Padat Karya Tunai Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” Skripsi oleh Nur Mawaddah UIN Alauddin Makassar, 2021. Penelitian ini membahas mengenai usaha pemberdayaan masyarakat yaitu dengan penguatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui program padat karya tunai di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan instrument penelitian yaitu peneliti sendiri dengan menggunakan bantuan kamera handphone dengan alat rekam. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dengan tahapan yaitu: 1) reduksi data, 2)

---

<sup>19</sup> Sumarto and Dwiantara, “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jurnal Publicuho*, Vol 2, No. 2 (2019). 65-74. <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>

penyajian data, 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk penguatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui program padat karya tunai di desa lembang lohe kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai yakni: 1) tahap perencanaan, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam sosialisasi bersama pemerintah dan analisa tentang sumber daya, 2) tahap pelaksanaan, yaitu mengikutkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di lokasi penelitian.<sup>20</sup>

5. “Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa” Tesis Oleh Chamim Chusna Jazuli IAIN Ponorogo, 2021. Tujuan Dalam Penelitian ini yaitu: Menganalisis pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo, Menganalisis Efektivitas pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo, dan Menganalisis Dampak Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa di Kecamatan Mlarak Ponorogo. Metode yang digunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Yaitu dengan memaparkan sedetil mungkin program Dana Desa sehingga diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat. Diamati secara terperinci, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa mulai kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedia sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian berjalan dengan efektif, melalui pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran dapat dikategorikan cukup efektif, dan Padat Karya Tunai Dana

---

<sup>20</sup> Nur Mawaddah, “Penguatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Subyek Pembangunan Melalui Program Padat Karya Tuna Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

Desa telah memberikan dampak positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis menghindari adanya bahasan yang sama dengan penelitian yang lain, dan dengan adanya penjelasan penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai penguat alasan penelitian ini dilakukan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini ialah membahas lebih dalam mengenai analisis pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Padat Karya Tunai (PKT). Peneliti berfokus pada bagaimana pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) apakah terealisasi dengan baik terhadap penerima manfaat ataukah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan sebagaimana mestinya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui peneliti adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid.

Dalam sebuah penelitian Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode metode penelitian yang dipergunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian secara langsung atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*)<sup>22</sup>, merupakan penelitian yang dilakukan pada masyarakat agar dapat menemukan

---

<sup>21</sup> Chamim Chusna Jazuli, “Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” (Tesis, IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>22</sup> Farida Nugrahani and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014).

fakta-fakta yang ada pada masyarakat mengenai masalah atau persoalan yang terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data yang valid, dimana peneliti mengambil langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu di Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kajian ini adalah bersifat Deskriptif kualitatif yang memiliki arti penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan sebagaimana adanya, dimana data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata dari pada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti berusaha menganalisis data dalam berbagai keadaan sesuai bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan keadaan obyek yakni tentang pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai (PKT) di desa cipta mulya kecamatan kebun tebu, kabupaten lampung barat.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan penelitian diantaranya Kepala Desa Cipta Mulya, sekretaris Desa Cipta Mulya, kepala Dusun yang ada di Desa Cipta Mulya serta masyarakat penerima PKT Desa Cipta Mulya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan,

---

<sup>23</sup> Ibid.



melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.<sup>24</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, artikel, dan data monografi di Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup>

**Tabel 1.2 Jumlah Populasi Penelitian**

No	Nama Kedusunan	Jumlah Penerima PKT
1.	Kedusunan Suka Mulya	22
2.	Kedusunan Mekar Mulya	19
3.	Kedusunan Sinar Mulya	20
4.	Kedusunan Jati Mulya	36
5.	Kedusunan Sindang Mulya	20
<b>Jumlah</b>		117

Sumber : Rekapitulasi Data Penerima Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022

#### b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi, hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.<sup>26</sup> Jumlah sampel merupakan salah satu bagian penting yang

<sup>24</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2018).

<sup>25</sup> Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>26</sup> Ibid.

harus diperhatikan, maka sebuah populasi tidak akan diteliti secara keseluruhan melainkan hanya diambil beberapa objek yang akan dijadikan sampel. Dalam penelitian kualitatif sampel penelitian merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang akan dibutuhkan dalam penelitian, informan dalam penelitian ini merupakan seseorang atau pelaku yang benar-benar tahu dan paham mengenai masalah yang akan diteliti.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel atau narasumber dengan ketentuan tertentu.<sup>27</sup> Peneliti dapat menentukan kriteria sampel sehingga pemilihan informan sampel ini lebih mempermudah dalam menangkap kelengkapan dan kedalaman data yaitu aparatur pekon dan masyarakat penerima program padat karya tunai yang berada di desa Cipta Mulya. Sampel yang diambil dianggap dapat mewakili sebuah populasi, untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar bersifat mewakili (Representatif). Dari uraian di atas maka peneliti menetapkan untuk mengambil jumlah sampel sebanyak 20 responden masyarakat penerima program Padat Karya Tunai dan 6 aparatur Desa yang ada di desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.<sup>28</sup> Observasi yang penulis lakukan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>28</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2018).

yaitu dengan melihat bagaimana keadaan masyarakat, hasil kerja masyarakat, serta proses yang dilakukan masyarakat penerima program PKT.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk pengumpulan data yang diperoleh dengan informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari respondes secara lebih mendalam dalam jumlah tertentu. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara serta situasi wawancara. Menurut Nasution wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>29</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat penerima program PKT.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Data-data tentang pekon, dokumentasi pengerjaan program PKT oleh masyarakat, dan hasil dari pengerjaan.

### e. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

---

<sup>29</sup> Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>30</sup> Menurut konsep Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid dengan tujuan dan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mencari tahu hal apa saja yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai.<sup>31</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data atau dapat disebut juga Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu kumpulan informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Tujuan dalam melakukan display data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

<sup>31</sup> Farida Nugrahani and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Books, 2014)*. 174

<sup>32</sup> Ibid.

### 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>33</sup> Dalam tahapan ini peneliti akan menginterpretasikan data-data yang didapat berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Namun dalam proses ini juga peneliti akan menggunakan analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu, pertama dengan cara membaca hasil dari pada kegiatan pengumpulan data, kedua dengan cara melengkapi data yang kiranya masih kurang, ketiga menginterpretasikan data berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

## I. Sistematika Penulisan

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Mulai dari teori pemanfaatan dana desa, pemberdayaan masyarakat dan program padat karya tunai (PKT) dan teori yang relevan atau berkaitan sesuai dengan tema skripsi.

### c. BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat tentang beberapa gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data di desa Cipta Mulya kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Yaitu terdiri

---

<sup>33</sup> Ibid.,176.

dari sejarah berdirinya desa Cipta Mulya, Struktur Organisasi dalam desa Cipta Mulya, kondisi demografis dan kependudukan.

#### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis efektivitas program padat karya tunai (PKT) terhadap pemanfaatan dana desa menurut perspektif ekonomi islam.

#### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan hasil, serta saran-saran, kesimpulan disajikan berdasarkan hasil penelitian yang berisikan uraian langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan sebuah hasil penelitian.




## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Efektivitas

#### 1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif, jika tujuan atau sasaran yang ditentukan telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan oleh setiap organisasi. Senada dengan pendapat Caster I. Bernard bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.<sup>34</sup>



Secara etimologi, efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan mempunyai arti keadaan berpengaruh, keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Adapun secara terminologi, para ahli mendefinisikannya sebagai berikut:

- a. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) tercapai, semakin besar persentase target yang dicapai semakin tinggi pula efektivitasnya.<sup>35</sup>
- b. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa efektivitas merupakan suatu gambaran mengenai

---

<sup>34</sup> Lubis and Hidayat, "Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah," *Jurnal Taxiway*, Vol 2, No. 1(2020).

<sup>35</sup> Aulia Lorie Pangestika and Yeni Priatna Sari, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal," *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK*, Vol. 1, No. 1 (2016).

- pencapaian unjuk kerja maksimal dan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) bisa tercapai.<sup>36</sup>
- c. Habey dalam Mangkunegara, efektif adalah tepat mengenai sasaran, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>37</sup>
  - d. Menurut Richard Steers, efektivitas ditentukan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.<sup>38</sup>
  - e. Robert Chambers mengemukakan bahwa secara komprehensif, efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan lembaga atau organisasi melaksanakan tugas pokoknya dan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan ukuran keberhasilan dari suatu organisasi maupun suatu program, oleh karena itu efektivitas sangat bergantung pada proses yang dilakukan. Karena proses memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

## 2. Pendekatan Dalam Mengukur Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi atau program bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misalnya, untuk sebuah perusahaan, efektivitas bisa berarti besar laba

---

<sup>36</sup> Hendra Hermawan, "Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No. 1 (2017): 150–67.

<sup>37</sup> Betty Stevera Masihin, Ermaya Suradinata, and Halilul Khairi, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat," *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Vol 13, No. 2 (2021): 309–22. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.435>

<sup>38</sup> Richard M Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisas* (Jakarta: Erlangga, 1980).

<sup>39</sup> Hairudin La Patilayi et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumatra Barat: Get Press, 2022).



yang diperoleh, sedangkan menurut pengamat sosial, efektivitas berarti tingkat kesejahteraan pekerjanya, atau jika lembaga pendidikan yang menginterpretasikannya, maka efektivitas berarti kualitas lulusan peserta didiknya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur suatu efektivitas, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan diantaranya :

a. Menurut Martani dan Lubis, tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi : <sup>40</sup>

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) mengukur efektivitas dari input. Efektivitas melalui keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dimana menyebutkan bahwa organisasi dalam melaksanakan program dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya sudah menggunakan sumber daya yang tepat dan layak untuk mendapatkan pemberdayaan. Sumber daya fisik dapat berupa sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, Sedangkan sumber daya non fisik dapat berupa informasi serta wewenang yang ada. Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi sehingga proses yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan sebuah organisasi tersebut melaksanakan program yang pada dasarnya biasanya melalui dari

---

<sup>40</sup> Hari Lubis and Martani Huseini, *Teori Organisasi* (Jakarta: Pusat Antar Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).

sebuah perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dari sebuah program tersebut.

- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Sasaran dalam mengukur suatu keberhasilan program pada pendekatan ini berdasarkan hasil yang dicapai apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya ataupun tidak. Pendekatan sasaran melihat efektivitas dari segi tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu sehingga hal tersebut menjadi bagian yang penting dalam pengukuran keefektivitasan sebuah organisasi.

b. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dengan:<sup>41</sup>

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya berfokus pada pencapaian sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Jalan yang diambil dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan . Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditentukan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang yaitu memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi dimasa mendatang.
- 5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Jika tidak, maka para pelaksana

---

<sup>41</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 77.

- program akan kurang memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Tersedianya sarana dan pra sarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Hal ini bergantung pada sarana dan pra sarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.
  - 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Sebaik apapun suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena itu pelaksanaan organisasi harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin.
  - 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

## **B. Padat Karya Tunai (PKT)**

### **1. Pengertian Padat Karya Tunai**

Padat karya tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa Padat Karya Tunai merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin/marginal yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi local dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapat dan menurunkan angka stunting. Padat Karya Tunai merupakan skema baru dalam mengalokasikan dana desa dimana pengalokasian dana desa diarahkan secara swakelola dalam artian masyarakat terlibat aktif dalam beberapa proyek desa. Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan prioritas Padat Karya Tunai yaitu untuk membangun sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Irfan Sofi, "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pasuruan Dan Kabupaten Probolinggo," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol 4, No. 1 (2020): 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>

Program Padat Karya Tunai berfokus pada masyarakat yang berkategori pengangguran, setengah pengangguran, penduduk miskin.<sup>43</sup> Program ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 127 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 pasal 128 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pemerintah memberlakukan kebijakan prioritas Dana Desa kepada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Alasan mendasar mengapa kebijakan Padat Karya Tunai perlu dilakukan, yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan yang mendukung bonus demografi, peningkatan Total Factor Productivity (TFP) dan perkembangan ekonomi digital.<sup>44</sup>

Fokus Program Padat Karya tunai ini adalah pada beberapa kegiatan pembangunan desa serta rehabilitasi sarana prasarana pedesaan sesuai dengan kewenangan desa. Sementara itu, Dana Desa Padat Karya Tunai juga difokuskan dalam pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi pertanian serta pemberdayaan masyarakat. Program tersebut juga perlu memperhatikan kearifan lokal masing-masing wilayah, perencanaan dan program kegiatan Padat Karya Tunai di desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja, kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.<sup>45</sup>

Pada program ini masyarakat dapat ikut andil dalam dalam pembangunan infrastruktur melalui skema dana desa yang

---

<sup>43</sup> Budiasa, Raka, and Mardika, "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Lebih, Gianyar," *Jurnal Publik*, Vol 4, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.71-82>

<sup>44</sup> Endik Hidayat, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang," *Soetomo Communication and Humanities*, Vol 1, No. 3 (2020): 126–36. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3613>

<sup>45</sup> Roni Ritonga Manembu, Albert W S Kusen, and Djeffry Deeng, "Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)," *Holistik, Journal of Social and Culture*, Vol 12, No. 2 (2019): 1–21.

tersedia. Selain itu, program ini juga terintegrasi dengan program kementerian teknis lainnya yang memiliki kegiatan di sebuah desa. Tujuannya yaitu agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan mendapat upah secara harian atau mingguan, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa.

Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai ini juga bergantung pada dukungan kerjasama dan kemitraan kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelaksanaan teknis oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Pelaksanaan Program ini juga sangat perlu mempertahankan kerja sama ataupun gotong royong dan partisipasi dari masyarakat desa sehingga pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat berjalan dengan baik oleh desa.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi dengan segera dalam hal itu pentingnya penguatan sinergi pemerintah baik itu pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Maka dari itu program Padat Karya Tunai ini dilaksanakan dengan mengutamakan atas kerja gotong royong, partisipasi serta musyawarah.

Latar belakang program Padat Karya Tunai dimulai dengan Rapat Terbatas tanggal 18 Oktober 2017 yaitu pemanfaatan dana desa ditambah dengan program Kementerian/Lembaga ke Desa yang dilakukan dengan model padat karya. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Terbatas tanggal 3 November 2017 yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja di desa dioptimalkan dengan padat karya tunai dan swakelola. Perlunya pelatihan dan pendampingan dalam menggali dan mengembangkan potensi desa.<sup>46</sup>

Menurut kementerian PPN/Bappenas tahun 2018 mengemukakan bahwa masalah yang melandasi program Padat Karya Tunai adalah masih tingginya angka gizi buruk dan

---

<sup>46</sup> Sri Suryanovi, "Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung," *Jurnal Kewidyaiswaraan*, Vol 4, No. 2 (2019): 166–81.

stunting, masih tingginya angka pengangguran, masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan, tingginya jumlah desa tertinggal, serta tingginya tingkat migrasi dan urbanisasi. Program yang dicadangkan yaitu pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi produktif. Pemberian manfaat dan dampak yang positif yang diharapkan dari program ini seperti peningkatan produksi dan nilai tambah, penciptaan upah tambahan pendapatan, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar, serta peningkatan aksesibilitas desa.<sup>47</sup>

Dasar hukum dari program Padat Karya Tunai ini adalah Undang- Undang Desa (pasal 22), No. 43/2014 (Pasal 127), Peraturan Presiden 54/2010 (Pasal 26), Peraturan Kepala LKPP No. 13/2013 (Pasal 4), PMK 50/PMK.07/2017 (Pasal 128), PMK 168/PMK.05/2015 No PMK 173/PMK.05/2016, dan arahan presiden. UU Desa (Pasal 22) menjelaskan bahwa penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepala Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Pemerintah No. 43/2014 (Pasal 127) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pembangunan desa yang dijalankan secara swakelola oleh desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan juga menyusun perencanaan serta penganggaran yang bertujuan pada kepentingan warga masyarakat desa tersebut.<sup>48</sup>

Pengadaan barang atau jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan bahan dari wilayah setempat, dilakukan secara gotong royong

---

<sup>47</sup> Adis Purnama Dewi and Yulistia Devi, "Upaya Bumdes Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)," *Salam (Islamic Economics Journal)*, Vol 3, No. 2 (2022): 174–95. <https://doi.org/10.24042/slm.v3i2.15008>

<sup>48</sup> Ibid.

dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat dituangkan dalam Perka LKPP No. 13/2013 (Pasal 4) PMK 50/PMK.07/2017 (Pasal 128) menjabarkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari desa setempat.<sup>49</sup>

Sasaran program Padat Karya Tunai yaitu pengangguran dan setengah pengangguran, yang dapat dikatakan pengangguran apabila penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Syarat setengah pengangguran yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin. Stunting merupakan penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.<sup>50</sup> Tahapan teknis pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di desa dimulai dari tahap pelaksanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan pembinaan serta pengawasan. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa perlu mempertahankan gotong royong dan partisipasi dari masyarakat desa sehingga pembangunan yang dihasilkan dengan baik.<sup>51</sup>

## 2. Prinsip Padat Karya Tunai

Prinsip Padat Karya Tunai Ada enam prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa* (Jakarta : Bumi Aksara, 2021).

<sup>50</sup> Astuti Sri Pawening and Puji Lestari, "Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo," *E-Societas* , Vol 9, No. 5 (2020).

<sup>51</sup> Deni Herdiyana, "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol 16, No. 02 (2019): 175–87.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

- a. Inklusif, yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas dan penganut kepercayaan.
- b. Partisipatif, yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa.
- c. Transparan dan Akuntabel, yaitu mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
- d. Efektif, yaitu dengan melakukan kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan dan pelestarian yang berkelanjutan.
- e. Swadaya dan Swakelola, maksudnya adalah mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
- f. Upah Kerja, adapun penentuan upah kerja berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Adapun batasan atas upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

### 3. Tujuan dan Manfaat Padat Karya Tunai

Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Adapun manfaat dan dampak adanya Program Padat Karya Tunai antara lain sebagai berikut:

- a. Menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran, setengah pengangguran, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk.
- b. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat.
- c. Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal.
- d. Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.



- e. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi.
- f. Turunnya tingkat kemiskinan perdesaan.
- g. Turunnya tingkat pengangguran perdesaan.
- h. Turunya jumlah balita gizi buruk di pedesaan.
- i. Turunya arus migrasi dan urbanisasi.<sup>53</sup>

#### 4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Hal ini diwujudkan dengan skema cash for work yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan pemberian upah kerja secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup> Adapun sifat kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa adalah

- a. Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan produktifitas masyarakat Desa.
- c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung, harian atau mingguan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Dirjen Pembangunan, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai*, (Jakarta, 2018).

<sup>54</sup> Yohanes Brian Sanjaya et al., "Analisis Pengaruh Bumdes, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Karangemiri, Kecamatan Pekuncen," *MidYear National Conference and Call for Paper*, Vol 1, No. 1 (2022).

<sup>55</sup> Hajar Risa, Badaruddin Badaruddin, And Munir Tanjung, "Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading," *Perspektif* , Vol 10, No. 2 (2021): 739–53. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2>

## C. Konsep Dana Desa

### 1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, tanah leluhur atau negeri asal yang merujuk pada satu kesatuan dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah pedesaan maupun desa sering dikaitkan dengan arti *rural* dan *village* yang disamakan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (urban). Konsep perkotaan serta pedesaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah teritorial ataupun administrasi, dalam hal itu perdesaan mencakup beberapa desa. Pengertian tentang desa sampai saat ini belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli, desa dibentuk dengan daerah yang berbeda budayanya dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga beberapa ahli berpendapat sesuai dengan tinjauannya masing-masing.<sup>56</sup>

Berdasarkan intruksi menteri dalam negeri RI No 11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan klasifikasi dan tipologi desa di Indonesia digolongkan pada tiga tingkatan yakni:

#### a. Desa Swadaya

Tipologi desa ini merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana yang minim, serta sangat bergantung pada alam. Secara umum, ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai berikut: 1). Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian pada sektor primer (berburu, menangkap ikan, dan bercocok tanam secara tradisional). 2). Produksi desa sangat rendah, yaitu di bawah 50 juta rupiah per tahun. 3). Adat-istiadat masih mengikat kuat. 4). Pendidikan dan keterampilan rendah,

---

<sup>56</sup> Marekan and Teguh Ansori, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo," *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol 1, No. 2 (2019): 117–28. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.743>

kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar. 5). Prasarana masih sangat kurang.<sup>57</sup>

b. Desa Swakarsa

Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.<sup>58</sup>

c. Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dan petaninya pun yang tidak terikat dengan adat-istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemajuan sebuah desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, seperti desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai bahkan percepatan dalam pembangunan yang lebih maju dibandingkan dengan desa yang jaraknya jauh dari kota. Jika dikaitkan dengan sebuah pemanfaatan dana desa maka pemerintah sebagai pelaksana program dana desa diharapkan secara intensif dapat melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan sarana prasarana desa ataupun melaksanakan sebuah program dengan maksimal sesuai dengan ketrampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan

---

<sup>57</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, "Sosiologi Perdesaan" (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup>Ibid., 46.

program kegiatan dengan pendampingan sesuai dengan keutamaan kepentingan masyarakat.

## 2. Definisi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN atau dengan nama lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>60</sup>

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.<sup>61</sup> Belanja pemerintah pusat berdasarkan jenisnya merupakan belanja barang, belanja modal, belanja pegawai, pembayaran bunga utang, bantuan sosial, belanja hibah, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah seperti otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana peribangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 1). Alokasi dasar, dan 2). Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>62</sup>

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa, perumusan program pembangunan dilakukan untuk semua bidang

---

<sup>60</sup> A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015).

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid., 3.

pembangunan yang terkait secara langsung ataupun tidak dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana. Dalam mewujudkan perumusan program dan kegiatan yang terukur maka kegiatan dan matrik program dilengkapi pula dengan indikator dan target kinerja yang perlu dicapai melalui pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut.<sup>63</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana desa bukanlah semata-mata tentang pemerataan tetapi keadilan yang lebih utama berdasarkan karakter kebutuhan desa. Maka dari itu jumlah atau nominal dana desa yang diterima akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan desanya.

Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan dana Desa Tahun 2018 Tentang Padat Karya Tunai Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dalam penelitian ini menekankan kepada aspek efektivitas Padat Karya Tunai yang menyebutkan Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan di Desa. Padat Karya Tunai Dana Desa harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel oleh pelaksana program yang berarti bahwa Dana Desa harus dikelola secara baik dan transparan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa secara tertib. Pelaksanaan program dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

---

<sup>63</sup> Muhammad Badri, "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)," *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol 7, No. 2 (2016): 62–73.

<sup>64</sup> Yoga Angger Wibowo, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Uniska Law Review*, Vol 1, No. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>.

### 3. Pokok-Pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai

Arahan Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai:

- a. Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Setiap Desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK). Perhitungan HOK adalah 1 (satu orang pekerja akan bekerja 8 jam dalam satu hari).
- b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang ditetapkan Desa sebelum diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan.
- c. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang belum ditetapkan setelah diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan.<sup>65</sup>

### 4. Tahapan Persiapan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai<sup>66</sup>

- a. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.
- c. Kompilasi Data dan Peta Keluarga Sejahtera dari BKKBN Kabupaten/Kota.
- d. Sosialisai Tingkat Desa dan Kompilasi Data Penganggur Tingkat Desa.
- e. Kompilasi Data Balita Penderita Gizi Buruk.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Herdiyana, "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau," *Jurnal penelitian pendidikan dan ekonomi*, Vol 16, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2193>

## 5. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai <sup>67</sup>

### a. Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai

Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi:

- 1) Laki-laki dan perempuan berusia di atas 15 tahun, dibuktikan oleh fotokopi KTP
- 2) Penduduk desa setempat, dibuktikan oleh fotokopi KTP
- 3) Penganggur dan setengah penganggur, dibuktikan dengan daftar penganggur dan setengah penganggur tiap RT dan RW.
- 4) Anggota keluarga miskin, dibuktikan dengan masuk data BKKBN sebagai Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I).
- 5) Anggota keluarga yang memiliki gizi buruk, dibuktikan dengan daftar keluarga dengan balita bergizi buruk tiap RT dan RW.

### b. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Desa dan APBDesa

Kebijakan 30% dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan padat karya tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RPK Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, atau melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan

---

<sup>67</sup> Kurnia and Widhiasthini, "Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal ilmiah Muqoddimah*, Vol 5, No. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.148-161>

menetapkan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018.

- c. Mekanisme Perubahan RKP Desa Tahun 2018, Perubahan APBDesa Tahun 2018 atau Penyusunan APBDesa 2018.

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang alokasi upah tenaga kerja belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan desa, harus melakukan pemusatan kegiatan.

## **6. Tahapan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai**

- a. Setiap kegiatan pembangunan Desa yang masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berakala Desa serta setiap kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari APBDesa wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, dengan tetap memberikan upah bagi tenaga kerja sebagaimana ketentuan kegiatan Padat Karya Tunai.
- b. Kepala Desa dengan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan wajib membuka pendaftaran tenaga kerja untuk Padat Karya Tunai dengan mengutamakan anggota masyarakat Desa yang sudah didata.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu tenaga pendamping profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa).
- d. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan sebagai forum pertanggungjawabandan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan Desa dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa. Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah Desa ini untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.



## D. Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan sebenarnya sangat terkait dengan konsep pembangunan alternative (*alternative development*) yang dikemukakan oleh John Friedman. Konsep ini menuntut adanya demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang memiliki tujuan untuk menjamin kepentingan rakyat dan kesamaan gender keadilan antar generasi. Pemberdayaan juga mencakup dua aspek yaitu: *to give or authority* dan *to give ability to enable*. Dalam pengertian pertama pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, sedangkan pengertian kedua pemberdayaan memiliki arti sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.<sup>68</sup>

Pemberdayaan masyarakat juga sering disebut sebagai konsep pembangunan ekonomi, politik, budaya, dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru tentang pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Pemberdayaan juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dimana hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Narayan yaitu: *Empowerment is key for : a. Quality of life and human dignity, b. good governance, c. Pro-poor growth and d. Project effectiveness*. Sebuah proses pemberdayaan tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subyek namun didalamnya juga sangat mementingkan perubahan dari sisi peran pemerintah, dimana peran pemerintah sangatlah penting untuk mampu menyelesaikan masalah dengan cermat dan bisa mengantisipasi masa depan yang baik, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang baik pula.<sup>69</sup>

Kenny Menyampaikan tentang pemberdayaan proses pemberdayaan juga dapat meningkatkan kesadaran akan identitas dan hak dari kelompok yang ter subordinasi akan tetapi

---

<sup>68</sup> Safri Miradj and Imam Shofwan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal* (Jawa Barat: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021).

<sup>69</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Publiciana*, Vol 9, No. 1 (2016): 158–90.

pemberdayaan juga bukan hanya tentang kesadaran, tetapi pemberdayaan juga akan menjadi sebuah perubahan bagi kondisi hidup seseorang.<sup>70</sup>

Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.<sup>71</sup> Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.<sup>72</sup>

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Safri Miradj and Imam Shofwan, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal* (Jawa Barat: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021).

<sup>71</sup> Yulistia Devi, "Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Terkait Dengan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung" (Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2013).

<sup>72</sup> Rizki Taufikurohman, Evi Ekawati, and Yulistia Devi, "Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Dan Islamic Social Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020)," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol 1, No. 2 (2022): 165–80.

<sup>73</sup> H A W Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli*, *Bulat Dan Utuh* (Jawa Barat: PT. RajaGrafindon Persada, 2003).

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Menegentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.<sup>74</sup> Hal ini dapat menjadi peluang bagi warga Desa agar memiliki lapangan pekerjaan meskipun sifatnya hanya sementara akan tetapi dapat menjadi sumber pendapatan, selain itu masyarakat juga dapat terlibat langsung dalam melaksanakan pembangunan.<sup>75</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Firmansyah (2012) Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat dan komunitas penerima program pemberdayaan mampu mengubah nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Derajat

---

<sup>74</sup> Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016," *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol 7, No. 2 (2017).

<sup>75</sup> Herlina Kurniati and Yulistia Devi, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol 7, No. 2 (2022): 187–208. <http://dx.doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>

keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.<sup>76</sup>

Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan, maka hal yang terpenting adalah terletak pada pelaksanaan proses/ tahapan suatu program/ kegiatan, yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi, kebutuhan utamanya, dan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga fasilitator sebaiknya melakukan pendekatan secara bottom-up (aspirasi masyarakat).<sup>77</sup>

Menurut Suharto pada buku manajemen pemberdayaan masyarakat mengemukakan bahwa, pelaksanaan proses dan pencapaian sebuah tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, serta Pemeliharaan. Adapaun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Menghindari adanya sebuah persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, serta mencegah

---

<sup>76</sup> Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 39, No. 1 (2019): 32-44. 10.21580/jid

<sup>77</sup> Ibid.

terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan nominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat agar mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang tetap kondusif agar keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat tetap terjadi. Pemberdayaan juga harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.<sup>78</sup>

### 3. Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.<sup>79</sup>

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Ibid., 108-109.

<sup>79</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

<sup>80</sup> Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, and Junia Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)," *Ekobis Syariah*, Vol 4, No. 1 (2021): 11–27.

- a. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Tidak adanya diskriminasi dalam keluarga yang menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran kekerasan.
- f. Kesadaran hukum dan politik: keterlibatan individu dalam pengambilan peran dalam proses hukum dan politik seperti mengetahui peranan pemerintah desa atau kelurahan.
- g. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public, tindakan bersama untuk membela orang lain dalam menghadapi perlakuan salah dalam keluarga atau masyarakat.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

#### **4. Rencana Pembangunan Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat**

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.<sup>81</sup> secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Maikel J Oruw, Burhanuddin Kiyai, and Joorie Marhaen Ruru, "Peranan Kepala Distrik Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No. 38 (2016).

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa.
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.<sup>82</sup>

## 5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Pemberdayaan dalam lingkup pembangunan masyarakat islam adalah bagian dari pembelajaran kepada masyarakat agar dapat melakukan upaya perbaikan kualitas hidup secara mandiri yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Suatu proses maupun tindakan yang terjadi dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi, dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras dalam bekerja, berinteraksi dan berwirausaha ini merupakan pengertian dari pemberdayaan masyarakat islam.<sup>83</sup>

Menurut teori Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti dalam Islam pemberdayaan masyarakat dibangun atas prinsip-prinsip yang sesuai ajarannya. Setidaknya terdapat tiga prinsip yang mesti dilakukan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad Mustanir, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik*, Vol 5, No. 2 (2017), 247–61. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127>

<sup>83</sup> Amsyal, Fitri, and Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)," *Jurnal Ekobis Syariah*, Vol 4, No. 1 (2020).

<sup>84</sup> Achmad Saeful, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol 3, No. 3 (2020), 1–17. <https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.159>

a. Prinsip kepedulian.

Prinsip ini sejatinya merupakan bagian penting dari ajaran Islam, bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan sebuah konsep tauhid dari ajaran Islam. Tauhid yang merupakan ajaran inti dalam Islam tidak sekedar bermakna pengakuan atas keesaan Allah. Tetapi mesti bermuara pada bentuk aksi dalam wilayah kemanusiaan. Aksi ini dapat dilakukan dengan membangun kepedulian kepada sesama sebagai bagian dari prinsip pemberdayaan.

Seseorang yang bertauhid patut mempraktekkan hubungan sosial secara baik. Di sisi lain mesti membantu setiap manusia yang tidak memiliki daya untuk menjadi berdaya. Bertauhid namun tidak mempraktikkan kepedulian, sama artinya dengan tidak bertauhid. Sebab muara dari bertauhid adalah memperdayakan manusia-manusia yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Sehingga mereka dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi yang dapat menjebak manusia pada kekufuran.

b. Prinsip keadilan

Menegakkan keadilan merupakan hakikat yang obyektif sehingga akan menciptakan kebaikan dan pelanggaran terhadapnya akan menyebabkan malapetaka bagi siapa pun yang melakukannya. Al-Qur'an menegaskan agar keadilan dilaksanakan dengan baik sekalipun kepada masyarakat lemah. Jangan sampai kekayaan dan harta menjadikan seseorang lupa untuk memberdayakan masyarakat lemah. Keadilan merupakan perbuatan yang paling mendekati taqwa. Semakin mampu seseorang membangun keadilan melalui pemberdayaan masyarakat, semakin ia dapat dekat dengan Tuhan. Masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, membiarkan kemewahan, anti sosial (membiarkan kaum terlantar), pasti akan dihancurkan Tuhan. Rasul berpesan dalam sebuah khutbah beliau agar masyarakat memperhatikan nasib kaum buruh atau kaum yang lemah secara ekonomi.



Dalam hal ini Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil".<sup>85</sup>

c. Prinsip kesamaan

Prinsip ini didasarkan pada semangat memanusiakan manusia. Dalam prinsip ini semua manusia sama, sehingga setiap manusia dilarang untuk mengganggap diri paling berdaya. Justru keberdayaan yang melekat pada diri manusia yang berdaya mesti diaktualisasikan dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat lemah. Semangat memanusiakan manusia merupakan semangat yang dapat melahirkan kesadaran jika setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain. Di sisi lain dapat mengikis sikap arogan yang kerap ada dalam diri manusia.

Prinsip kesamaan merupakan bagian penting dalam aspek kemanusiaan. Pada aspek ini manusia dituntut untuk saling membantu dan menolong kepada sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin dapat berdiri sendiri, segala hal yang melekat dalam diri manusia pasti tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan bantuan orang lain, meskipun hanya sebatas doa. Dengan demikian jika ada manusia yang merasa dirinya paling berdaya, sejatinya telah memunafikan sisi kemanusiaan yang ada pada dirinya.

Sebuah keseimbangan tidak hanya dilihat atau ditimbang kebaikan hasil usahanya yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan atau kebebasan perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara serta keseimbangan antara hak dan kewajiban

---

<sup>85</sup> Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1 (2012). 10.15408/aiq.v4i1.2542

harus direalisasikan juga. Selain itu pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi islam, seperti kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.

Salah satu pentingnya penerapan pemberdayaan masyarakat dalam islam adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan diharapkan akan adanya perubahan, maka dari itu diharapkan juga akan terus dapat memperbaiki taraf hidup manusia ke tahap yang lebih baik.

Terdapat penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat islam kitab suci Al-qur'an yaitu pada Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ  
 اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Ra'd [11]:)*

Berdasarkan Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Maka dari itu dapat kita pahami bahwa dengan melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan begitu mereka dapat mengelola dan mempertajam kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir sehingga dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Manusia juga berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam surat Al-Qashash ayat 77 menjelaskan :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman sehingga islam menajarkan serta menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang berawal dari pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam sebuah teori pemberdayaan masyarakat dikenal dengan pendekatan yang berpusat pada manusia. Seperti yang dijelaskan oleh surat al-anfaal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada manusia merupakan suatu upaya yang ada dalam diri manusia tersebut agar terjadi sebuah perubahan. Sebagaimana mestinya bahwa manusia yang memiliki niat untuk berubah atau melakukan usaha akan dimudahkan jalannya oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Maka dari itu diharapkan melalui pemberdayaan ini masyarakat dapat membukakan jalannya sehingga dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.
- Buku Pintar Dana, *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, Jatim:AE Publishing, 2020.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca, 2018.
- Jaharuddin, and Sutrisno Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2019.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Lubis, Hari, and Martani Huseini. *Teori Organisasi*, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.
- Miradj, Safri, and Imam Shofwan. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal*, Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books 1, 2014.
- Patilaiya, Hairudin La, James Sinurat, Budi Sarasati, Sri Jumiyati, Asep Supriatna, Budi Harto, Urhuhe Dena Siburian, Indah Wahyu Maesarini, and Trisnani Dwi Hapsari. *Pemberdayaan Masyarakat*, Get Press, 2022.
- Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai, 2018.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta ; Bumi aksara, 2008.
- Steers, Richard M. Terj Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Sudaryono, Dr. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, In Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Susilana, Rudi, and Cepi Riyana. *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Penilaian*. Jakarta Utara: CV. Wacana Prima, 2008.
- Widjaja, H A W. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindon Persada, 2003.

## JURNAL

- Abbas, Anwar. "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1 (2012). 10.15408/aiq.v4i1.2542
- Amsyal, Rouzi, Cut Dian Fitri, and Junia Farma. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)." *Ekobis Syariah*, Vol 4, No. 1 (2021): 11–27.
- Badri, Muhammad. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)." *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol 7, No. 2 (2016): 62–73. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>.
- Budiasa, Anak Agung Gde Rai, A A Gde Raka, and I Made Mardika. "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Lebih, Gianyar." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No. 2 (2019) : 71–82. <https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.71-82>
- Devi, Yulistia. "Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Terkait Dengan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung." Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, (2013).
- Dewi, Adis Purnama, and Yulistia Devi. "Upaya Bumdes Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)." *Salam*, Vol 3, No. 2 (2022): 174–95. <https://doi.org/10.24042/slm.v3i2.15008>
- Hafid, Risma. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016." *Jurnal Repositori, Univeristas Hasanuddin*, Vol 7, No. 2 (2017).
- Herdiyana, Deni. "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau."

- Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol 16, No. 2 (2019): 175–87.
- Hermawan, Hendra. “Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No. 1 (2017): 150–67.
- Kurnia, Ujang Endi, and Ni Wayan Widhiasthini. “Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, Vol 5, No. 1 (2021): 148–61. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.148-161>
- Lubis, Rajab, and Arifal Hidayat. “Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah.” *Jurnal Taxiway*, Vol 2, No. 1 (2020): 11–18.
- Marekan, Marekan, and Teguh Ansori. “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo.” *Journal of Community Development and Disaster Management*, Vol 1, No. 2 (2019): 117–28. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.743>
- Margayaningsih, Dwi Iriani. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.” *Publiciana*, Vol 9, No. 1 (2016): 158–90.
- Masihin, Betty Stevera, Ermaya Suradinata, and Halilul Khairi. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.” *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Vol 13, No. 2 (2021): 309–22. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.435>
- Mustanir, Ahmad. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik Profetik*, Vol 5, No. 2 (2017): 247–61. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i.2127>
- Retno Dewi Anggraeni, and Ani Margawati. “Jurnal Ilmiah Kesehatan Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistemik Review Jurnal Ilmiah Kesehatan”, Vol 14, No. 2 (2021): 139–51. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10875>
- Oruw, Maikel J, Burhanuddin Kiyai, and Joorie Marhaen Ruru. “Peranan Kepala Distrik Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat).” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No. 038 (2016).

- Pangestika, Aulia Lorie, and Yeni Priatna Sari. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal." In *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK*, Vol 1, No.1 (2016).
- Rahmawati, Yunita Dewi, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah. "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol 7, No.1 (2021), 189–202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>
- Risa, Hajar, Badaruddin Badaruddin, and Munir Tanjung. "Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading." *Perspektif*, Vol 10, No. 2 (2021): 739–53. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2>
- Saeiful, Achmad. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol 3, No. 3 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.159>
- Sanjaya, Yohanes Brian, Adi Wiratno, Siti Maghfiroh, and Werdha Candhratrilaksana. "Analisis Pengaruh Bumdes, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen." In *MidYear National Conference and Call for Paper*, Vol. 1, No. 1 (2022).
- Sany, Ulfi Putra. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 39, No. 1 (2019): 32–44. <https://doi.org/10.21580/jid>
- Sofi, Irfan. "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pasuruan Dan Kabupaten Probolinggo." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol 4, No. 1 (2020): 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25>
- Sumarto, Rumsari Hadi, and Lukas Dwiantara. "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Journal Publicuho*, Vol 2, No. 2 (2019): 65–74. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>
- Suryanovi, Sri. "Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung." *Jurnal Kewidyaiswaraan*, Vol 4, No. 2 (2019): 166–81.
- Taufikurohman, Rizki, Evi Ekawati, and Yulistia Devi. "Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Dan Islamic Social Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020)." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan*

*Islam*, Vol 1, No. 2 (2022): 165–80.

Wijaya, Muhamad Rudi, and Anas Habibi Ritonga. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam.” *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, Vol 1, No. 02 (2021): 21–33.

### **SKRIPSI**

Jazuli, Chamim Chusna. “Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2021.

Manembu, Roni Ritonga, Albert W S Kusen, and Djefry Deeng. “Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Taranan Kabupaten Minahasa Selatan).” *Holistik, Journal of Social and Culture* 12, 2019: 1–21.

Mawaddah, Nur. “Penguatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Subyek Pembangunan Melalui Program Padat Karya Tuna Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

### **ARTIKEL**

Budi, Iman Setya, and Arie Syantoso. “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.71-82>

Dian, Tiara Rama, and Muhammad Farid Ma’ruf. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).” *Publika*, Vol 7, No. 4 (2019): 6.

Hidayat, Endik. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang.” *Soetomo Communication and Humanities*, Vol 1, No. 3 (2020): 126–36. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3613>

Jenderal, Direktorat, and Pangan. “Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jendral Tanaman Pangan Tahun 2018,” 2018, 1–146.

Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,” 2012.

Pawening, Astuti Sri, and Puji Lestari. “Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.” *E-Societas*, Vol 9, No. 5 (2020).

Wibowo, Yoga Angger. “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Uniska Law Review*, Vol 1, No. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>.